GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 24 Agustus 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-6649 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.4-3738 Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 204);

26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 223);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan Satun Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber dana manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
14. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Pasal 2

APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah semula berjumlah Rp.6.274.132.092.948,00 (enam triliun dua ratus tujuh puluh empat miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.147.771.997.432,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.6.126.360.095.516,00 (enam triliun seratus dua puluh enam miliar tiga ratus enam puluh juta sembilan puluh lima ribu lima ratus enam belas rupiah);

b. Belanja Daerah semula berjumlah Rp6.438.050.092.948,00 (enam triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar lima puluh juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp193.955.043.436,57 (seratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh lima juta empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam koma lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.244.095.049.511,43 (enam triliun dua ratus empat puluh empat miliar sembilan puluh lima juta empat puluh sembilan ribu lima ratus sebelas ribu koma empat puluh tiga rupiah); dan

c. Pembiayaan Daerah melalui penerimaan pembiayaan semula berjumlah Rp194.918.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) berkurang sebesar Rp77.183.046.004,57 (tujuh puluh tujuh miliar seratus delapan puluh tiga juta empat puluh enam ribu empat rupiah koma lima tujuh) sehingga menjadi Rp117.734.953.995,43 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah koma empat tiga) dan Pembiayaan Daerah melalui pengeluaran pembiayaan semula berjumlah Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) berkurang sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah), serta jumlah pembiayaan netto semula Rp163.918.000.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) berkurang sebesar Rp46.183.046.004,57 (empat puluh enam miliar seratus delapan puluh tiga juta empat puluh enam ribu empat rupiah koma lima tujuh) sehingga menjadi Rp117.734.953.995,43 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah koma empat tiga).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp2.832.388.541.948,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp24.945.378.432,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.807.443.163.516,00 (dua triliun delapan ratus tujuh miliar empat ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah);

b. Pendapatan transfer semula sebesar Rp3.423.868.351.000,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp122.826.619.000,00 (seratus dua puluh dua miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.301.041.732.000,00 (tiga triliun tiga ratus satu miliar empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah); dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp17.875.200.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah semula sebesar Rp2.114.428.147.371,00 (dua triliun seratus empat belas miliar empat ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp4.042.870.714,00 (empat miliar empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.118.471.018.085,00 (dua triliun seratus delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan belas ribu delapan puluh lima rupiah);

b. Retribusi Daerah semula sebesar Rp418.152.450.667,00 (empat ratus delapan belas miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp31.527.853.360,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh

rupiah) sehingga menjadi Rp 386.624.597.307,00 (tiga ratus delapan puluh enam miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh rupiah);

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan semula sebesar Rp144.997.550.509,00 (seratus empat puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp5.315.404.629,00 (lima miliar tiga ratus lima belas juta empat ratus empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp139.682.145.880,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah); dan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula sebesar Rp154.810.393.401,00 (seratus lima puluh empat miliar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp7.855.008.843,00 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesarRp 162.665.402.244,00 (seratus enam puluh dua miliar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat semula sebesar Rp3.423.868.351.000,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp137.462.859.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.286.405.492.000,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh enam miliar empat ratus lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); dan

b. Pendapatan transfer antar daerah semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp14.636.240.000,00 (empat belas miliar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 14.636.240.000,00 (empat belas miliar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Operasi semula sebesar Rp4.651.549.209.669,70 (empat triliun enam ratus lima puluh satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan koma tujuh nol rupiah) berkurang sebesar Rp80.189.018.018,04 (delapan puluh miliar seratus delapan puluh sembilan juta delapan belas ribu delapan belas koma nol empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 4.571.360.191.651,66 (empat triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus enam puluh juta seratus embilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu koma enam puluh enam rupiah);

b. Belanja Modal semula sebesar Rp858.159.447.578,00 (delapan ratus lima puluh delapan miliar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp88.540.231.086,72 (delapan puluh delapan miliar lima ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh enam koma tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp769.619.216.491,28 (tujuh ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus sembilan belas juta dua ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh satu koma dua puluh delapan rupiah);

c. Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp37.004.236.211,30 (tiga puluh tujuh miliar empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sebelas koma tiga nol rupiah) berkurang sebesar Rp32.004.236.211,30 (tiga puluh dua miliar empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah koma tiga nol) sehingga menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan

d. Anggaran Belanja Transfer semula sebesar Rp891.337.199.489,00 (delapan ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp6.778.441.879,49 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp898.115.641.368,49 (delapan ratus sembilan puluh delapan miliar seratus lima belas juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan ribu koma empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai semula sebesar Rp2.645.455.313.089,00 (dua triliun enam ratus empat puluh lima miliar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp35.438.287.854,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.680.893.600.943,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);

b. Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp1.844.469.337.396,70 (satu triliun delapan ratus empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma tujuh nol rupiah) berkurang sebesar Rp116.397.186.292,04 (seratus enam belas miliar tigas ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua koma nol empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.728.072.151.104,66 (satu triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuah puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu seratus empat koma enam puluh enam rupiah);

c. Belanja Subsidi semula sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp5.375.000.000,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus ratus dua puluh lima juta rupiah); dan

d. Belanja hibah semula sebesar Rp155.124.559.184,00 (seratus lima puluh lima miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp6.144.880.420,00 (enam miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp161.269.439.604,00 (seratus enam puluh satu miliar dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat rupiah).

(2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah semula sebesar Rp17.017.254.528,00 (tujuh belas miliar tujuh belas juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp2.235.052.507,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp14.782.202.021,00 (empat belas miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua ribu dua puluh satu rupiah);

b. Belanja modal peralatan dan mesin semula sebesar Rp211.992.404.798,00 (dua ratus sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp3.248.280.446,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp208.744.124.352,00 (dua ratus delapan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp170.710.598.059,00 (seratus tujuh puluh miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp34.579.127.662,53 (tiga puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua koma lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp136.131.470.396,47 (seratus tiga puluh enam miliar seratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma empat puluh tujuh rupiah);

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp413.202.299.883,00 (empat ratus tiga belas miliar dua ratus dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp65.407.262.238,19 (enam puluh lima miliar empat ratus tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan koma sembilan belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp347.795.037.644,81 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh empat koma delapan puluh satu rupiah); dan

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp45.236.890.310,00 (empat puluh lima miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp16.929.491.767,00 (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp62.166.382.077,00 (enam puluh dua miliar seratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah).

(3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, semula sebesar Rp37.004.236.211,30 (tiga puluh tujuh miliar empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sebelas koma tiga nol rupiah) berkurang sebesar Rp32.004.236.211,30 (tiga puluh dua miliar empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sebelas koma tiga nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil semula sebesar Rp860.837.199.489,00 (delapan ratus enam puluh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp5.968.943.179,49 (lima miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan koma empat sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp866.806.142.668,49 (delapan ratus enam puluh enam miliar delapan ratus enam juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan koma empat puluh sembilan rupiah); dan

b. Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp809.498.700,00 (delapan ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp31.309.498.700,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp194.918.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah)

berkurang sebesar Rp77.183.046.004,57 (tujuh puluh tujuh miliar seratus delapan puluh tiga juta empat puluh enam ribu empat koma lima tujuh rupiah) sehingga Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan menjadi sebesar Rp117.734.953.995,43 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma empat tiga rupiah).

b. Pengeluaran Pembiayaan semula sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) berkurang sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) sehingga Jumlah Pegeluaran Pembiayaan setelah perubahan menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya semula sebesar Rp194.918.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) berkurang sebesar Rp77.183.046.004,57 (tujuh puluh tujuh miliar seratus delapan puluh tiga juta empat puluh enam ribu empat koma lima tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp117.734.953.995,43 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma empat tiga rupiah).

(2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari Penyertaan Modal Daerah semula sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) berkurang sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan /atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan /atau
   d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan /atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.	Lampiran I	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.	Lampiran II	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.	Lampiran III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
e.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.	Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
g.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJM dengan Rancangan APBD;
h.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
i.	Lampiran IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
j.	Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
k.	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;

Pasal 11

Kepala Daerah menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Oktober 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ARRY YUSWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 :
(5-169/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang di bahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sertai ditetapkan Peraturan Daerah. Penyusunan Perubahan APBD tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penyelengaran pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Secara garis besar, struktur Perubahan APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Perubahan APBD merupakan salah satu agenda rutin daerah sebagai bagian dari tahapan sistem pengelolaan keuangan dalam rangka terlaksananya penatausahaan keuangan daerah secara optimal, transparan dan akuntabel serta disusun berdasarkan ketentuan per undang-undangan yang berlaku. Perubahan APBD pada prinsipnya merupakan penyempurnaan dan perbaikan atas APBD tahun berjalan, dengan mempertimbangkan pencapaian dari target pendapatan dan realisasi belanja yang telah dilaksanakan serta menampung baik di sisi pendapatan maupun sisi belanja dan pembiayaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 228

Lampiran I : Rancangan Peraturan Daerah
Nomor : 05 Tahun 2025
Tanggal : 2 Oktober 2025

PROVINSI SUMATERA BARAT
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2.832.388.541.948,00**	**2.807.443.163.516,00**	**-24.945.378.432,00**
4.1.01	Pajak Daerah	2.114.428.147.371,00	2.118.471.018.085,00	4.042.870.714,00
4.1.02	Retribusi Daerah	418.152.450.667,00	386.624.597.307,00	-31.527.853.360,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	144.997.550.509,00	139.682.145.880,00	-5.315.404.629,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	154.810.393.401,00	162.665.402.244,00	7.855.008.843,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.423.868.351.000,00**	**3.301.041.732.000,00**	**-122.826.619.000,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.423.868.351.000,00	3.286.405.492.000,00	-137.462.859.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	14.636.240.000,00	14.636.240.000,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**17.875.200.000,00**	**17.875.200.000,00**	**0,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	17.875.200.000,00	17.875.200.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	**6.274.132.092.948,00**	**6.126.360.095.516,00**	**-147.771.997.432,00**
5	**BELANJA DAERAH**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.651.549.209.669,70**	**4.571.360.191.651,66**	**-80.189.018.018,04**
5.1.01	Belanja Pegawai	2.645.455.313.089,00	2.680.893.600.943,00	35.438.287.854,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.844.469.337.396,70	1.728.072.151.104,66	-116.397.186.292,04
5.1.04	Belanja Subsidi	6.500.000.000,00	1.125.000.000,00	-5.375.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	155.124.559.184,00	161.269.439.604,00	6.144.880.420,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**858.159.447.578,00**	**769.619.216.491,28**	**-88.540.231.086,72**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	17.017.254.528,00	14.782.202.021,00	-2.235.052.507,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	211.992.404.798,00	208.744.124.352,00	-3.248.280.446,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	170.710.598.059,00	136.131.470.396,47	-34.579.127.662,53
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	413.202.299.883,00	347.795.037.644,81	-65.407.262.238,19
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	45.236.890.310,00	62.166.382.077,00	16.929.491.767,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**37.004.236.211,30**	**5.000.000.000,00**	**-32.004.236.211,30**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	37.004.236.211,30	5.000.000.000,00	-32.004.236.211,30
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**891.337.199.489,00**	**898.115.641.368,49**	**6.778.441.879,49**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	860.837.199.489,00	866.806.142.668,49	5.968.943.179,49
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	30.500.000.000,00	31.309.498.700,00	809.498.700,00
	Jumlah Belanja	**6.438.050.092.948,00**	**6.244.095.049.511,43**	**-193.955.043.436,57**
	Total Surplus/(Defisit)	**-163.918.000.000,00**	**-117.734.953.995,43**	**46.183.046.004,57**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**194.918.000.000,00**	**117.734.953.995,43**	**-77.183.046.004,57**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	194.918.000.000,00	117.734.953.995,43	-77.183.046.004,57
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**31.000.000.000,00**	**0,00**	**-31.000.000.000,00**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	31.000.000.000,00	0,00	-31.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**31.000.000.000,00**	**0,00**	**-31.000.000.000,00**
	Pembiayaan Netto	**163.918.000.000,00**	**117.734.953.995,43**	**-46.183.046.004,57**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Provinsi Sumatera Barat, 2 Oktober 2025

Gubernur

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI